

Asing Puji Undang-Undang Minerba

31 Maret 2009 | 14:43 WIB

Hidayat Tantan
tantan@majalahtambang.com



Bambang Gatot A.

Jakarta-TAMBANG. Keyakinan Pemerintah bahwa UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba akan menggairahkan investasi mulai terbukti. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono menyebutkan sudah ada empat perusahaan asing yang mengajukan aplikasi untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), antara lain Rio Tinto (Australia), Barrick Gold (Kanada), Southern Arc (Kanada) atau dikenal dengan Indotan.

Rio Tinto mengajukan aplikasi untuk tambang emas Lemonga, Nusa Tenggara Barat, Barrick Gold Corp di proyek emas di Bengkulu, dan Rio Tinto untuk proyek nikel Lasamphala, Sulteng-Sultra.

Sebenarnya, ketiga perusahaan itu sudah mengajukan aplikasi Kontrak Karya (KK) jauh sebelum UU Minerba diketuk palu. Toh mereka tak ngotot. Mereka bersedia melanjutkan proyek di bawah rezim IUP. "Jadi tidak beralasan kalau dikatakan UU Minerba disebut tidak "investor friendly"," ujarnya kepada Majalah TAMBANG di sela-sela acara Sosialisasi UU No. 4 Tahun 2009, Selasa, 31 Maret 2009, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Beberapa kalangan seperti IMA (Indonesia Mining Association) dan Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebelumnya memprediksi UU Minerba akan mengganggu iklim investasi pertambangan, karena tidak ramah terhadap investor. Lembaga tersebut menyebutkan dalam tiga empat tahun pengaruh tersebut akan terlihat

Mantan Dirjen Minerba Pabum, Simon F. Sembiring mengamini pernyataan Bambang. Ia mengaku dua minggu setelah UU Minerba diundangkan, dia diundang ke kediaman Duta Besar Australia. Di sana ia juga bertemu dengan beberapa pengusaha pertambangan asal Australia.

"Mereka bilang UU Minerba sangat bagus, transparan, dan ada kepastian berusaha," ujar Simon. Pujian serupa, ia dapatkan beberapa waktu lalu saat bertemu Kadin Amerika (American Chamber).

Simon menegaskan tidak adil jika tiga atau empat tahun ke depan tak ada investasi baru di dunia pertambangan, dianggap sebagai kesalahan UU Minerba seperti disebutkan PwC. "Semua tahu itu karena krisis global. Di mana pun tak ada investasi. Tak ada kaitannya dengan UU Minerba," kata Simon, yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Minerba.